

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Achmad Ali. 2017. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2004. *Meluruskan Jalan Reformasi Hukum*. Jakarta; Agatama Press.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Achmad Ruslan. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Yogyakarta; Rangkang Education.
- Bahder Johan Nasution. 2012. *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung; Penerbit Mandar Maju.
- Bambang Poernomo. 1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta; Amarta Buku.
- Darmawan Napitupulu, et.al. 2020, *E-Government: Implementasi, Strategi dan Inovasi*, Yayasan Kita Menulis .
- Donald Black. 1976. *The Behavior of Law*. New York; Academic Press.
- Erni Widhayanti. 1998. *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di Dalam KUHAP*. Yogyakarta; Liberty.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,), hlm. 234.
- Faisal Abdullah. 2009. *Jalan Terjal Good Governance Prinsip, Konsep & Tantangan dalam Negara Hukum*. Makassar; Pukap.
- Herlambang Rahmadani. 2020. *Collaborative Governance Dalam Penyediaan Infrastruktur*. Yogyakarta; Deepublish.
- Jimly, Asshiddiqie, 2010 *"Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia"*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya; Penerbit Laksbang Mediatama.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Laode M. Syarif. 2012. *Jalan Panjang Penghapusan Penyiksaan*. Jakarta Selatan; Kemitraan Partnership.
- Lilik Mulyani, 2022, “*Reformasi Hukum Acara Pidana: Teori dan praktik menuju RKUHAP*”, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Luthfi Widodo Eddyono. 2019. *Hak Asasi Manusia & Hukum Internasional Di Indonesia*. Depok.; PT. Rajagrafindo Persada.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta; Kanisius.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*. Jakarta; Universitas Indonesia.
- Marwan Effendy, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Dinamika dan Perkembangannya*, (Jakarta: Erlangga).
- Notohamidjojo. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta; Gunung Mulia.
- Novita Tresuana Dan Noverman Duadji. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduksi)*. Yogyakarta; Suluh Media.
- Nurkholis Hidayat. 2012. *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan Di Indonesia*. Jakarta Selatan; Kemitraan Partnership.
- O.C. Kaligis. 2006. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung; Alumni.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya; Bina Ilmu.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian. Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*. Yogyakarta; Laksbang Pressindo.
- Sadjijono, S. 2008. *Seri hukum Kepolisian, Polri dan Good Governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama., hlm. 341.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti.

Setiono. 2004. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Surakarta; Universitas Sebelas Maret.

Syamsul Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan; Medan Area University Press.

Yesmil Anwar. 2011. *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung; Widya Padjadjaran.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28G ayat (2) Tentang Hak bebas dari penyiksaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai tersangka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 77.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.

Sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005, yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

JURNAL DAN KARYA ILMIAH:

A. C. Kristiyawan, A. Munawar dan Hidayatullah, 2023. Urgensi Restorative Justice dalam Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan dalam Perkara Pidana, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.4, No.7.

Awaluddin, A. 2017. Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional dalam Mewujudkan Tata Kelola Kepolisian Yang Baik. Jurnal Media Hukum, 24(1).

Ade Daharis, *Et Seq*, 2024, *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 Nomor 6, Universitas Muhammadiyah Palu.

Ana Gotsiridze, 2024, *Definition And Of Torture In Criminal Law, Internasional Jornal Of Law: Law And Word, University of Georgia. Volume 10; Issue 1.*

Bagus Teguh Santoso, 2022, "Upaya paksa (*dwang middelen*) dalam dugaan terjadinya tindak pidana bagi penyidik", *Mimbar Yustitia*, Vol.6, No.1.

Husni Djalil Nazarudin dan Muhammad Nur Rasyid, 2017, "*Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian* (Studi Kasus di Polres Pidie)." *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 2.

Komnas HAM, "Laporan Tahunan 2025, Jakarta: Komnas HAM RI, 2025.

Laksamana Muhammad Fariz, 2024, *Perlindungan hukum terhadap Hak-Hak Tersangka Pada proses Pemeriksaan dalam penyidikan (suatu penelitian di wilayah hukum kepolisian Resor Kota Banda Aceh)*, Vol. 8 No. 1, *Jurnal ilmiah mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, "Catatan Akhir Tahun 2024 Elegasi Demokrasi Dan keadilan Merebut Kendala, Menentang Tirani", Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2024.

Martono, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23, No. 1.

Ombudsman RI, Laporan Tahunan 2025, Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia 2025

Putu Agus Nurgraha, Mulyadi, Saddam Husein Rangkuti, 2024, *Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian*, Karimah Tauhid, Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia Volume 3 Nomor 3 Nomor 4.

United Nations Development Programme, *Governance for Sustainable Human Development*, (New York: UNDP, 1997).

Wibowo, C. C. 2012. Kebijakan Strategis Guna Mengoptimalkan Peran KOMPOLNAS Dalam Mempercepat Reformasi. Karya Ilmiah Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2012.

SUMBER INTERNET:

Darmawan Diguga Tewas Dianiaya Tiga Anggota Polrestabes Makassar, Pihak Keluarga Telah Lapor Polisi, <https://makassar.kompas.com/read/2023/08/25/142025778/darmawan-diduga-tewas-dianiaya-tiga-anggota-polrestabes-makassar>, diakses Pada Tanggal 8 April 2025.

Kematian Tahanan Penyidikan di Makassar: Rantai Kekerasan Di Tahanan Kepolisian Terus diabaikan, 2022, <https://icjr.or.id/kematian-tahanan-penyidikan-di-makassar-rantai-kekerasan-di-tahanan-kepolisian-terus-diabaikan/>, Diakses pada tanggal 22 April 2024.

Usut Kekerasan Aparat Di Dalam Lingkungan Universitas, Mei 3, 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-kekerasan-aparat-di-dalam-lingkungan-universitas/05/2024/>, Diakses pada Tanggal 25 April 2024.

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), "25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan Lapas, <https://kontras.org/artikel/25-tahun-indonesia-ratifikasi-cat-presiden-jokowi-dan-dpr-ri-gagal-hentikan-praktik-penyiksaan-di-kepolisian-tni-dan-lapas>, diakses pada Tanggal 28 Desember 2024.

Komnas Ham RI (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), 2024, *Sikap Komnas HAM tentang Pentingnya Menghapus Penyiksaan di Indonesia*, [https://www.komnasham.go.id/files/20240626-sikap-komnas-ham-tentang-pentingnya-\\$8AV9.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20240626-sikap-komnas-ham-tentang-pentingnya-$8AV9.pdf), diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), "Konvensi Anti Penyiksaan", <https://icjr.or.id/konvensi-anti-penyiksaan/>, diakses pada tanggal 28 Desember 2024.

Institute For Criminal Justice Reform (ICJR), (publikasi Koalisi) Sembilan Masalah dalam RUU KUHP, <https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhp/>, diakses pada tanggal 14 Juli 2025.

Indra Purnama, "Divisi Propam, Apa Tugas dan Kewajiban?", Tempo, 11 Agustus 2022, <https://www.tempo.co/hukum/divisi-propam-apa-tugas-dan-kewajiban--309338>, Diakses pada tanggal 3 Juli 2025.

Tempo, Amnesty International Ungkap Rentetan Kekerasan Polisi Terhadap Mahasiswa di Makassar, 4 Mei 2024, diakses melalui <https://www.tempo.co/hukum/amnesty-international-ungkap-rentetan-kekerasan-polisi-terhadap-mahasiswa-di-makassar-62287> pada 15 Januari 2025 Pukul 20.30 WITA.

10 Kasus yang Jadi Perhatian Komnas HAM Sepanjang 2024", <https://www.hukumonline.com/berita/a/10-kasus-yang-jadi-perhatian-komnas-ham-sepanjang-2024-lt6770ec71becc3/>, diakses pada 30 Juni 2025.